

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

1. BPKAD Kota Padang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah. BPKAD memiliki peran krusial dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif. Peran BPKAD yaitu :

- a. **Perencanaan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja** yang efisien dan akuntabel, guna mengarahkan investasi ke sektor-sektor penghasil PAD.
- b. **Pengelolaan aset daerah** secara optimal agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan.
- c. **Pengelolaan uang daerah** dengan strategi treasury yang produktif, termasuk penempatan dana idle dan manajemen arus kas.
- d. **Kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD** yang tercermin dari data Laporan Realisasi Anggaran dalam empat tahun terakhir.

2. Meskipun BPKAD Kota Padang telah menunjukkan upaya nyata dalam mengelola keuangan dan aset daerah secara lebih akuntabel dan produktif, pengelolaan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan

pada berbagai kendala strategis dan teknis. Beberapa hambatan utama yang diidentifikasi antara lain:

a. Terbatasnya investasi jangka pendek akibat tingginya kebutuhan kas operasional, kebijakan kehati-hatian, dan minimnya instrumen investasi yang tersedia, yang menyebabkan potensi PAD dari dana idle tidak tergarap maksimal.

b. Penyertaan modal pada BUMD yang belum memberikan imbal hasil sesuai harapan, disebabkan oleh lemahnya tata kelola, ketergantungan terhadap subsidi, dan kurangnya inovasi usaha, sehingga penyertaan modal lebih membebani fiskal daerah daripada memberikan manfaat.

c. Aset daerah belum termanfaatkan secara optimal, terutama karena lokasi aset yang kurang strategis, minimnya rencana pemanfaatan, serta kurangnya minat dari pihak swasta, yang menyebabkan banyak aset menjadi tidak produktif secara ekonomi.

d. Kendala teknis pada penggunaan SIPD yang menyebabkan ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan, serta menghambat akurasi data dan pengambilan keputusan yang berbasis informasi keuangan yang andal.

3. Untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, BPKAD Kota Padang perlu menerapkan solusi strategis yang menyentuh aspek sumber daya manusia, pemanfaatan aset



dan keuangan daerah, serta manajemen keuangan yang lebih baik. Tiga solusi utama yang dapat dilakukan antara lain:

a. Peningkatan kualitas SDM melalui bimbingan teknis yang berfokus pada penguasaan sistem informasi keuangan seperti SIPD-RI dan pemanfaatan aset daerah, agar aparatur BPKAD lebih profesional, adaptif, dan kompeten dalam menjalankan tugasnya.

b. Optimalisasi pemanfaatan aset dan uang daerah, dengan mendorong aset tidak produktif menjadi sumber ekonomi melalui kerja sama pemanfaatan, serta mengelola dana idle secara progresif melalui penempatan di instrumen investasi yang aman dan menguntungkan.

c. Pembenahan manajemen keuangan daerah, termasuk penyusunan anggaran berbasis kinerja, penerapan sistem keuangan terintegrasi, serta penguatan pengawasan internal guna meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan anggaran.

## 5.2 Saran

a. Pemerintah Daerah perlu secara konsisten mengalokasikan anggaran dan waktu untuk pelatihan berkelanjutan bagi SDM BPKAD, terutama dalam penguasaan teknologi informasi dan regulasi keuangan terbaru. Hal ini penting untuk meningkatkan kompetensi teknis dan mencegah kesalahan dalam pengelolaan anggaran serta pemanfaatan sistem seperti SIPD-RI.



b. Optimalisasi aset daerah harus dilakukan melalui strategi jangka panjang yang melibatkan penilaian ulang (revaluasi), penataan kepemilikan aset, dan eksplorasi kerja sama pemanfaatan dengan sektor swasta. Pemerintah juga disarankan membentuk tim khusus yang fokus pada identifikasi dan konversi aset tidak produktif menjadi sumber PAD.

c. Penerapan sistem informasi keuangan seperti SIPD perlu ditingkatkan dari sisi integrasi antar-OPD dan dukungan teknis. Pemerintah daerah disarankan untuk aktif berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri guna mempercepat perbaikan teknis dan pengembangan fitur SIPD yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.

